



Kontribusi Intelektual Dan Transformasi Pendidikan Pada Masa Tiga Kerajaan Besar Islam (1500–1800 M)

Intellectual Contributions And Educational Transformation During the Period of The Three Great Islamic Kingdoms (1500–1800 Ad)

Abdul Muthalib¹, Muh. Ilham²

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: abdulmuthalib3105@gmail.com¹, milhamnew2022@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-01-2026

Revised : 09-01-2026

Accepted : 11-01-2026

Pulished : 13-01-2026

Abstract

The period from the 16th to the 18th centuries CE, known as the "Gunpowder Empires" (Ottoman, Safavid, and Mughal), is often marginalized in historiography as a time of intellectual stagnation. This study aims to deconstruct this narrative of decline through an in-depth comparative analysis of educational structures and intellectual production across the three empires. Through a synthesis of historical data and an evaluation of key institutions and figures, the study finds that each empire developed distinctive educational strategies in response to internal and external challenges. The Ottoman Empire established a stratified bureaucracy through the Ilmiye and Enderun systems to support state centralization. The Safavid Empire made education an instrument of Shia conversion and sparked a philosophical renaissance through the "School of Isfahan." Meanwhile, the Mughal Empire pursued a path of rational pragmatism through the Dars-i-Nizami curriculum to manage a pluralistic society. The study concludes that this educational transformation in the early modern era served as a dynamic arena for intellectual innovation that laid a crucial foundation for modernity in the Islamic world.

Keywords : Gunpowder Empire, Ilmiye System, Safavid Philosophy

Abstrak

Periode abad ke-16 hingga ke-18 Masehi, yang dikenal sebagai era "Kerajaan Mesiu" (Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mughal), sering dimarjinalkan dalam historiografi sebagai masa stagnasi intelektual. Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi narasi kemunduran tersebut melalui analisis komparatif mendalam terhadap struktur pendidikan dan produksi intelektual di ketiga imperium. Melalui sintesis data historis dan evaluasi institusi serta tokoh kunci, studi ini menemukan bahwa setiap kerajaan mengembangkan strategi pendidikan distingtif sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal. Kesultanan Utsmaniyah membentuk birokrasi terstratifikasi melalui sistem *Ilmiye* dan *Enderun* untuk menopang sentralisasi negara. Kekaisaran Safawiyah menjadikan pendidikan instrumen konversi Syiah sekaligus memicu renaisans filosofis melalui "Sekolah Isfahan". Sementara itu, Kekaisaran Mughal menempuh jalur pragmatisme rasional lewat kurikulum *Dars-i-Nizami* untuk mengelola masyarakat pluralistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan pada era modern awal ini berfungsi sebagai arena dinamis bagi inovasi intelektual yang meletakkan landasan penting bagi modernitas di dunia Islam.

Kata Kunci : Kerajaan Mesiu, Sistem Ilmiye, Filsafat Safawiyah



PENDAHULUAN

Sejarah dunia Islam pada periode modern awal didominasi oleh kehadiran tiga entitas politik raksasa yang secara kolektif menguasai wilayah luas dari Balkan hingga Teluk Benggala. Fenomena ini, yang sering dikategorikan sebagai "Kerajaan Mesiu" (*Gunpowder Empires*), menandai berakhirnya fragmentasi politik pasca-Mongol dan munculnya sentralisasi kekuasaan yang didukung oleh teknologi militer baru dan birokrasi yang canggih. Ketiga kerajaan ini—Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mughal—meskipun memiliki perbedaan geografis dan etnis yang tajam, menghadapi tantangan struktural yang serupa: kebutuhan untuk melegitimasi kekuasaan absolut, mengelola populasi yang beragam secara religius dan etnis, serta merespons ekspansi kolonialisme Eropa.

Dalam kajian sejarah intelektual, periode ini sering kali dianggap sebagai masa stagnasi jika dibandingkan dengan zaman klasik Islam. Namun, penelitian terkini membantah pandangan tersebut dan menunjukkan bahwa kehidupan intelektual pada masa itu justru sangat hidup. Dinamika intelektual pada masa ini harus dipahami dalam konteks internal masyarakat Islam itu sendiri, di mana terjadi proses verifikasi ilmu pengetahuan, sintesis antara wahyu dan akal, serta birokratisasi ulama yang mengubah wajah pendidikan Islam secara fundamental.

Periode 1500–1800 M merupakan masa formatif yang menentukan identitas keagamaan dan intelektual dunia Islam modern. Konsolidasi Sunni di bawah payung Utsmaniyah dan Mughal, yang berhadapan dengan penetapan Syiah sebagai agama negara di Iran Safawiyah, menciptakan polarisasi intelektual yang memicu produksi literatur polemik, teologis, dan filosofis yang masif. Selain itu, interaksi intensif antara tradisi intelektual Persia, Arab, Turki, dan India menciptakan sebuah jaringan pengetahuan global di mana ide-ide beredar melintasi batas imperium.

Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana struktur dan kurikulum institusi pendidikan bertransformasi untuk melayani kebutuhan politik masing-masing kerajaan, serta menelaah kontribusi intelektual orisinal yang muncul dalam bidang sains, filsafat, dan hukum yang menantang narasi kemunduran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai studi kepustakaan (*library research*) yang berakar pada paradigma kualitatif. Alih-alih berfokus pada pengukuran statistik, kajian ini lebih menitikberatkan pada kedalaman interpretasi terhadap teks dan wacana seputar *Qashash al-Qur'an*. Fokus utamanya adalah mendekonstruksi makna, struktur narasi, dan kerangka konseptual kisah-kisah dalam Al-Qur'an, lalu meninbaunya melalui kacamata teori historiografi—baik dari tradisi keilmuan Islam maupun perspektif sejarah modern.

Guna mengurai dinamika pemikiran pendidikan Islam yang kompleks, penelitian ini menempuh jalur kualitatif dengan pendekatan sejarah intelektual komparatif (*comparative intellectual history*). Pilihan metodologis ini diambil untuk tidak sekadar merekonstruksi fakta-fakta masa lalu, melainkan berupaya melacak genealogi pemikiran serta konteks sosio-politik yang melingkupinya. Basis data utama penelitian digali melalui penelusuran kepustakaan yang



mendalam (*library research*) dan pemeriksaan komprehensif terhadap sumber-sumber otoritatif. Sumber-sumber ini mencakup rekam jejak sejarah kurikulum madrasah, biografi intelektual para ulama (*tabaqat*), hingga karya-karya tulis monumental yang lahir pada periode tersebut.

Dalam proses analisis, perhatian utama dicurahkan untuk membedah transisi epistemologis yang terjadi dalam struktur keilmuan Islam. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana terjadi pergeseran paradigma dari dominasi tunggal ilmu-ilmu wahyu (*al-ulūm al-manqūlāt*) menuju upaya integrasi yang lebih intensif dengan ilmu-ilmu rasional (*al-ulūm al-ma'qūlāt*) dalam kurikulum pendidikan. Lebih jauh lagi, studi ini juga menyoroti variabel eksternal yang krusial, yakni peran patronase kerajaan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan politik dan finansial dari elit penguasa berfungsi sebagai katalisator dalam memfasilitasi inovasi ilmiah dan pergeseran kurikulum tersebut. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan untuk membangun narasi sejarah yang utuh mengenai perkembangan intelektual di masa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Urgensi Ilmu Rijāl al-Ḥadīṣ

Kesultanan Utsmaniyah merepresentasikan model integrasi paling komprehensif antara pendidikan, agama, dan negara dalam sejarah Islam. Berbeda dengan dinasti-dinasti sebelumnya yang membiarkan institusi pendidikan relatif otonom, Utsmaniyah membangun sistem hierarkis yang menempatkan ulama sebagai pejabat negara guna menciptakan stabilitas ideologis yang kokoh. Tulang punggung pendidikan Utsmaniyah adalah sistem *medrese* yang diorganisasi secara ketat untuk membentuk korps birokrat dan hakim yang terstandardisasi.

Sistem ini terstratifikasi berdasarkan kompleksitas kurikulum, dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga rangkaian *medrese* tingkat tinggi seperti *Sahn-ı Seman*. Untuk mencapai posisi puncak, seorang penuntut ilmu harus melewati serangkaian ujian ketat dengan kurikulum inti yang berfokus pada ilmu-ilmu instrumental (*alat*) seperti bahasa dan logika, serta ilmu-ilmu tinggi seperti fikih dan tafsir. Mengingat tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim dan mufti, studi hukum Islam mazhab Hanafi sangat mendominasi proses pembelajaran ini.

Inovasi paling signifikan Utsmaniyah terlihat pada pembentukan kelas *Ilmiye*, sebuah hierarki profesional bagi kaum terpelajar. Lulusan *medrese* elit terintegrasi ke dalam struktur negara dengan jalur karier yang jelas, mulai dari profesor (*mudarris*), hakim distrik, hingga hakim agung. Puncak dari hierarki ini adalah posisi *Şeyhülislam*, pejabat agama tertinggi yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi kebijakan sultan. Sistem ini tidak hanya memastikan standar kompetensi, tetapi juga menjamin loyalitas ulama kepada negara.

Selain *medrese*, Utsmaniyah mengembangkan sistem pendidikan paralel di istana yang disebut *Enderun*. Institusi ini dirancang khusus untuk membentuk elite militer dan administratif dari kalangan *devshirme*, yaitu rekrutan Kristen yang masuk Islam. Kurikulumnya lebih eklektik dibandingkan *medrese*, mencakup pendidikan fisik, militer, seni, budaya, serta sains praktis seperti



matematika dan geografi. Sistem ini menciptakan meritokrasi di mana individu dididik secara khusus untuk melayani administrasi kekaisaran dengan efisiensi tinggi.

Di bidang sains, Utsmaniyah menunjukkan atensi yang besar pada abad ke-16, terutama dalam astronomi. Puncaknya adalah pendirian Observatorium Istanbul di bawah arahan Taqi al-Din, yang berhasil menciptakan instrumen mekanik presisi dan menerapkan pecahan desimal dalam astronomi. Meskipun observatorium ini berusia singkat akibat tekanan politik konservatif, inovasi sains praktis terus berlanjut di tingkat individu. Pada abad ke-17, tokoh intelektual seperti Katip Çelebi muncul dengan karya bibliografi ensiklopedis dan geografi yang mulai mengintegrasikan sumber-sumber Barat. Hal ini menandai awal kesadaran akan urgensi pembaruan ilmu pengetahuan dan keterbukaan terhadap dunia luar.

Kekaisaran Safawiyah: Transformasi Teologis dan Renaisans Filosofis

Berbeda dengan birokrasi Utsmaniyah yang cenderung legalistik dan stabil, Kekaisaran Safawiyah di Iran merepresentasikan sebuah transformasi teologis dan filosofis yang radikal. Pendidikan pada era Safawiyah tidak sekadar berfungsi sebagai wahana transmisi pengetahuan, melainkan menjadi instrumen strategis dalam proyek ideologis negara untuk merekayasa identitas keagamaan Iran secara total dari Sunni menjadi Syiah Itsna Asyariyah. Proses "Syiahisasi" ini menuntut restrukturisasi total infrastruktur pendidikan dan impor modal intelektual baru. Akibat minimnya ulama Syiah lokal pada masa awal dinasti, Safawiyah secara aktif mendatangkan ulama-ulama Syiah dari wilayah Arab, seperti Jabal Amil (Lebanon Selatan), Bahrain, dan Irak Selatan.

Para intelektual diaspora ini, seperti Al-Karaki, diberikan posisi strategis dan otoritas untuk merombak kurikulum serta praktik keagamaan, mengisi kekosongan intelektual, sekaligus melegitimasi kekuasaan para Shah. Negara kemudian melembagakan jabatan *Sadr*, seorang pejabat tinggi yang dimandatkan untuk mengelola wakaf dan mengawasi institusi keagamaan. Langkah ini memastikan bahwa doktrin yang diajarkan di madrasah-madrasah selaras dengan kepentingan ideologis negara.

Capaian intelektual paling monumental dan orisinal dari era ini adalah lahirnya "Sekolah Isfahan" (*Maktab-e Isfahan*). Di bawah patronase Shah Abbas I, Isfahan bertransformasi menjadi pusat gravitasi bagi kebangkitan kembali filsafat Islam, yang sebelumnya sering dianggap meredup di dunia Sunni pasca-Al-Ghazali. Kurikulum madrasah di Isfahan memiliki karakteristik unik karena berhasil mensintesis tiga disiplin yang kerap dianggap berseberangan: filsafat peripatetik (*burhān*), gnostisisme atau tasawuf (*ʿirfān*), dan teologi syariah (*kalām/fiqh*). Integrasi ini melahirkan generasi pemikir yang tidak hanya otoritatif dalam hukum agama, tetapi juga mendalam dalam spekulasi metafisika.

Tiga tokoh sentral yang menjadi pilar renaissans ini adalah Mir Damad, Mulla Sadra, dan Shaykh Bahai. Mir Damad, yang dijuluki sebagai "Guru Ketiga" (*al-Muʿallim al-Thālith*), berupaya mensintesis filsafat Avicenna (Ibnu Sina) dengan ajaran Syiah dan filsafat Iluminasi (*Ishrāqī*). Ia mengembangkan konsep *ḥudūth dahrī* (penciptaan abadi) sebagai jembatan epistemologis dalam perdebatan antara agama dan filsafat mengenai asal-usul alam semesta.



Namun, muridnya, Mulla Sadra, melampaui pencapaian sang guru dengan menyusun sistem filsafat baru yang dikenal sebagai *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah* atau Teosofi Transenden.

Mulla Sadra melakukan revolusi metafisika melalui doktrin *Aṣālat al-Wujūd* (Primat Eksistensi), yang menegaskan bahwa eksistensi adalah realitas fundamental yang mendahului esensi. Lebih jauh, ia memperkenalkan konsep *Ḥarakah al-Jawhariyyah* atau Gerak Substansial. Berbeda dengan pandangan Aristotelian yang memandang perubahan hanya terjadi pada sifat-sifat luar benda (*aksiden*), Sadra berargumen bahwa perubahan terjadi pada level substansi itu sendiri; bahwa seluruh alam semesta berada dalam kondisi *flux* dan transformasi konstan menuju kesempurnaan ilahi. Pemikiran ini memberikan landasan filosofis yang dinamis bagi teologi Syiah dan tetap menjadi materi kurikulum dominan di seminari-seminari Iran hingga kini.

Di sisi lain, Shaykh Bahai merefleksikan dimensi polimatik dari era Safawiyah. Ia adalah seorang *faqīh* (ahli hukum) yang dihormati, sekaligus arsitek, matematikawan, dan astronom ulung. Kejeniusannya bermanifestasi dalam perencanaan kota Isfahan, termasuk desain *Naqsh-e Jahan Square* dan rekayasa sistem hidrolik yang canggih untuk kota tersebut. Ia juga menulis *Khulāṣat al-Hisāb*, sebuah buku teks matematika yang menjadi standar rujukan di dunia Islam selama berabad-abad, serta mendukung teori rotasi bumi dalam risalah astronominya. Hal ini mengindikasikan bahwa sains rasional dan ilmu agama berjalan beriringan secara harmonis dalam tradisi pendidikan Safawiyah.

Analisis Komparatif dan Pembahasan

Meskipun ketiga kerajaan ini saling terhubung dalam jaringan ilmu pengetahuan global, mereka memiliki strategi pendidikan yang berbeda sesuai kebutuhan lokalnya. Utsmaniyah merancang pendidikan yang terpusat untuk mencetak pegawai pemerintah dan ulama yang patuh demi melancarkan roda pemerintahan. Berbeda dengan Safawiyah, yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat ajaran agama dan filsafat, tujuannya adalah membangun identitas bangsa yang kuat. Sementara itu, Mughal di India memilih jalan yang lebih praktis (pragmatis). Karena memimpin masyarakat yang sangat beragam, mereka menggunakan logika dan filsafat dalam pendidikan untuk melatih pejabat agar mampu mengelola perbedaan budaya dengan bijak.

Zaman ini juga sangat dinamis karena para cendekiawan bebas berpindah tempat. Salah satu fenomena terpenting adalah banyaknya pemikir dan seniman yang pindah dari Iran ke India demi mendapatkan dukungan yang lebih baik dari istana Mughal. Bahasa Persia menjadi bahasa pemersatu yang membuat pertukaran ide antar-negara ini berjalan lancar. Fakta-fakta ini membantah anggapan lama bahwa periode ini adalah masa kemunduran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak mati, tetapi fungsinya bergeser: dari sekadar teori menjadi alat untuk menjaga keamanan negara, menyatukan pemahaman agama, dan mengatur masyarakat yang majemuk.

KESIMPULAN

Periode 1500 hingga 1800 Masehi di dunia Islam merepresentasikan era konsolidasi dan transformasi intelektual yang mendalam, alih-alih sekadar fase stagnasi atau kegelapan. Ketiga imperium merespons dinamika zaman dengan strategi pendidikan yang distingtif sesuai konteks



geopolitik masing-masing. Kesultanan Utsmaniyah memanifestasikan keunggulannya melalui institusionalisasi birokrasi pendidikan yang rigid, menciptakan stabilitas relasi antara agama dan negara yang presedennya bertahan lama.

Kekaisaran Safawiyah mewariskan renaissance filosofis yang monumental; sebuah sintesis epistemologis yang berhasil mengintegrasikan rasionalitas, wahyu, dan mistisisme dalam satu bangunan teologis yang kokoh, terutama melalui kontribusi intelektual Mulla Sadra dan para kolega di Sekolah Isfahan. Sementara itu, Kekaisaran Mughal mengembangkan paradigma pendidikan pragmatis dan inklusif. Melalui kurikulum *Dars-i-Nizāmī* yang menekankan logika (*ma'qūlāt*) serta eksperimen sinkretisme intelektual Dara Shikoh, mereka menumbuhkan kemampuan adaptasi kultural yang tinggi di tengah masyarakat plural.

Transformasi pendidikan pada fase ini membuktikan bahwa peradaban Islam memiliki vitalitas untuk terus berinovasi dan beradaptasi secara dinamis dalam merespons kompleksitas tantangan sosio-politik di era modern awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (2018). *Sejarah peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bagir, H. (2017). *Islam Tuhan, Islam manusia: Agama dan spiritualitas di zaman kacau*. Bandung: Mizan.
- Huda, R. (2019). Pemikiran Dara Shikoh tentang harmonisasi Islam dan Hindu. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(1), 32-45.
- Karim, M. A. (2015). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Nurhidayati, F. (2018). Konsep gerak substansial Mulla Sadra dan relevansinya terhadap konsep pendidikan Islam. *Jurnal Kalimah*, 16(1), 45-66.
- Pulungan, J. S. (2017). *Sejarah peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Rubini. (2019). Pendidikan Islam pada masa Dinasti Mughal (tinjauan sosio-historis). *Jurnal Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(1), 71-92.
- Supriyadi, D. (2016). *Sejarah peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrul, M. (2016). Sistem pendidikan Islam masa Daulah Utsmaniyah. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 16(2), 202-218.
- Syukur, F. (2015). *Sejarah peradaban Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.